



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024-2026

RENSTRA
DISTAKAN
2024-2026

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Bukit Hibul Barat No. 170
Telp / Fax : (0532) - 2071037
NANGA BULIK – 74162
Email : distakan.lamandau@gmail.com
Website : distakan.lamandau.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dapat disusun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau, merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai panduan dan pedoman pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau selama 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026) berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Disusun mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan kebijakan dan program dan kegiatan, yang akan dilaksanakan setiap tahun yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja (renja) pemerintah daerah pada bidang pertanian dan perikanan, agar skala prioritas program dan kegiatan menjadi lebih konkret, terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan untuk menuntaskan isu sentral bidang pertanian dan perikanan di Kabupaten Lamandau.

Partisipasi, peranan, dedikasi, motivasi, dukungan dan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini sangat menentukan keberhasilan terlaksananya program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas keterlibatannya dalam penyusunan Renstra ini.



Disadari bahwa Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya melalui dan reviu/revisi yang dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Nanga Bulik, 30 Maret 2023

KEPALA DINAS,



TIRYAN KUDERON, S.Pi, M.M.

Penyama Utama Muda

NIP. 19720528 199903 1 006



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau	10
2.2 Sumber Daya Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.....	31
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.....	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.....	58
BAB. III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU	
3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	65
3.2 Telaahan RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026.....	67
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	73
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	76



BAB. V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi dan Kebijakan	80
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN	82
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
BAB. VIII	PENUTUP	91



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan atas dasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Lamandau berfungsi untuk menjabarkan arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan



berbagai sumber daya yang dimiliki daerah. Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Lamandau berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.

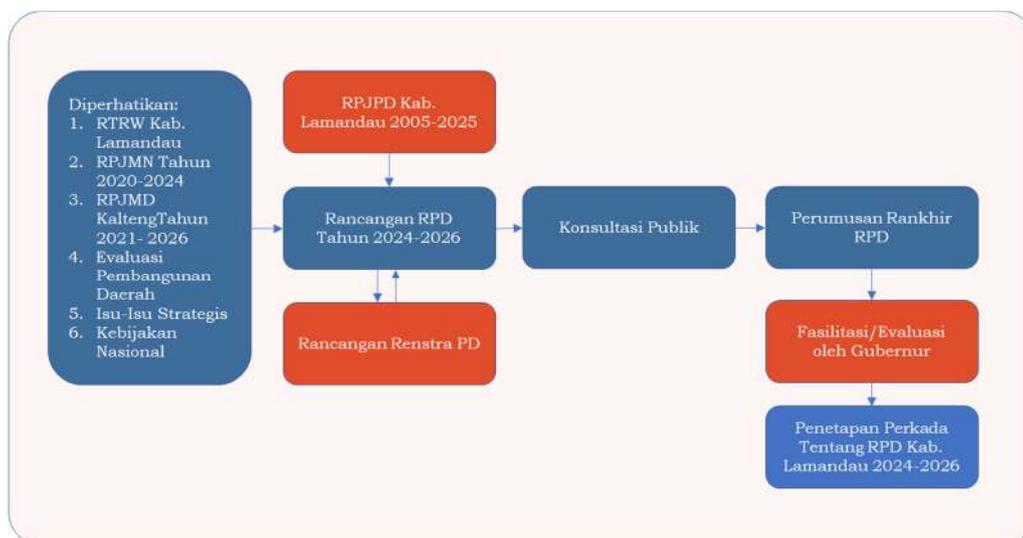
Dalam menyusun Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, Peraturan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun pada periode Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan resmi OPD untuk periode 3 tahun. Dokumen Renstra OPD berfungsi mengarahkan pelayanan OPD dan memuat serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra OPD disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam tiga tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan

tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa tiga tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2024-2026 disusun sebagai tindaklanjut implementasi amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

Proses dan tahapan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 secara diagram dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Alur Penyusunan Rencana Strategis OPD Kabupaten Lamandau 2024-2026

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 (hasil analisis)



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi



- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
 28. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;



29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.



7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung tujuan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama tiga tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur OPD, sumber daya OPD termasuk SDM dan asset, serta kinerja pelayanan OPD berdasarkan capaian Renstra periode sebelumnya yaitu 2019-2023.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251) maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau meyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian dan perikanan;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak serta benih ikan;
- e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- f. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan dan penyakit ikan;



- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan hasil perikanan;
- j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian dan pengawasan izin perikanan;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan perikanan;
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perikanan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

Susunan organisasi organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Bidang Perkebunan;
- f. Bidang Peternakan;
- g. Bidang Perikanan;
- h. Bidang Penyuluhan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis.



2.1.1 Kewenangan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sesuai pasal (3) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal (4). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai kewenangan:

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian dan perikanan;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak serta benih ikan;
- e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- f. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan dan penyakit ikan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan hasil perikanan;
- j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian dan pengawasan izin perikanan;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan perikanan;
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perikanan; dan



- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala

Kepala Dinas bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menerapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan rencana dan program bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
- c. perencanaan, pengembangan dan penggalian bibit unggul pertanian, perkebunan dan peternakan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian;
- e. pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;



- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
- g. pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan penilaian prestasi kerja pegawai dan pembinaan karir;
- h. penyelenggaraan pelatihan teknis dan pembinaan teknis pertanian;
- i. pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;



- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sekretariat terdiri atas:

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. subbagian keuangan dan aset.

Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

2.1.3.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpulkan, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian umum dan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- c. Memfasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas;



- d. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, mengelola surat menyurat, arsip, perpustakaan, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi aparatur sipil negara meliputi penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan serta;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian;
- h. Menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester;
- i. Mengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengelola administrasi melaksanakan reformasi birokrasi dan budaya kerja pada dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengelola urusan perjalanan dinas;
- l. Menyusun standar operasional prosedur subbagian umum dan kepegawaian;
- m. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- n. Menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi pada subbagian umum dan kepegawaian; dan



- p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

2.1.3.2 Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian keuangan dan aset.

Subbagian keuangan dan aset mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja subbagian keuangan dan aset;
- b. Menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset;
- c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- f. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- g. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;
- h. Menyusun rencana kebutuhan barang unit , penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;
- i. Membuat daftar kebutuhan barang, rencana tahunan barang unit;
- j. Menerbitkan surat perintah membayar;
- k. Memverifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- l. Menyusun laporan keuangan;
- m. Melaksanakan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- n. Melaksanakan urusan perpajakan;
- o. Menyusun standar operasional prosedur subbagian keuangan dan aset;



- p. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian keuangan dan aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- q. Menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian keuangan dan aset;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi subbagian keuangan dan aset; dan
- s. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

2.1.4 Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. Pemberian fasilitas investasi pertanian;
- g. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2.1.5 Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.



2.1.5 Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.



5.1.6 Bidang Peternakan

Bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.



2.1.7 Bidang Perikanan

Bidang perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bidang perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, prasarana dan sarana perikanan, melakukan pengendalian dan pengawasan bidang usaha perikanan budidaya dan tangkap, kesehatan ikan, sumberdaya perikanan, pengembangan mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bidang perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perikanan;
- b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis data bidang perikanan;
- c. penyiapan bahan penelitian/pengujian dan pengembangan teknologi budidaya perikanan, penangkapan ikan dan teknologi anjuran bidang perikanan;
- d. penyiapan bahan perumusan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian kelayakan teknis teknologi perikanan;
- e. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

2.1.8 Bidang Penyuluhan

Bidang penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bidang penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Bidang penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang penyuluhan;



- b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta;
- g. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

2.1.9 Unit Pelaksana Teknis

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT pada Dinas ditetapkan dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.9 Kelompok Jabatan

2.1.9.1 Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok



Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan. Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas instansi pemerintah.

2.1.9.2 Jabatan Pelaksana

Jenis dan jumlah kebutuhan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja. Nama-nama Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas dengan keputusan Bupati. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan



Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahan PNS dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Uraian tugas Jabatan Pelaksana lingkup Dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. Pengangkatan dan pemindahan PNS diusulkan oleh kepala perangkat daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam peta jabatan perangkat daerah.

2.1.10 Kepegawaian dan Eselon

2.1.10.1 Kepegawaian

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi PNS dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi tambahan ditetapkan oleh kepala perangkat Daerah masing-masing dengan keputusan kepala perangkat Daerah. Pejabat pada Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Formasi PNS di lingkungan Dinas disusun sesuai peraturan perundang-undangan.



2.1.10.2 Eselon

Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Sekretaris dan kepala bidang adalah Jabatan Struktural eselon IIIa dan IIIb atau Jabatan Administrator. Kepala subbagian adalah Jabatan Struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

2.1.11 Tata Kerja dan Laporan

2.1.11.1 Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala bidang, Kepala UPT, Kepala Subbagian serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.



Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

2.1.11.2 Laporan

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

2.1.12 Pendanaan

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Dinas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah



dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.12 Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas dan ASN yang melaksanakan tugas pada UPT Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

2.1.13 Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau

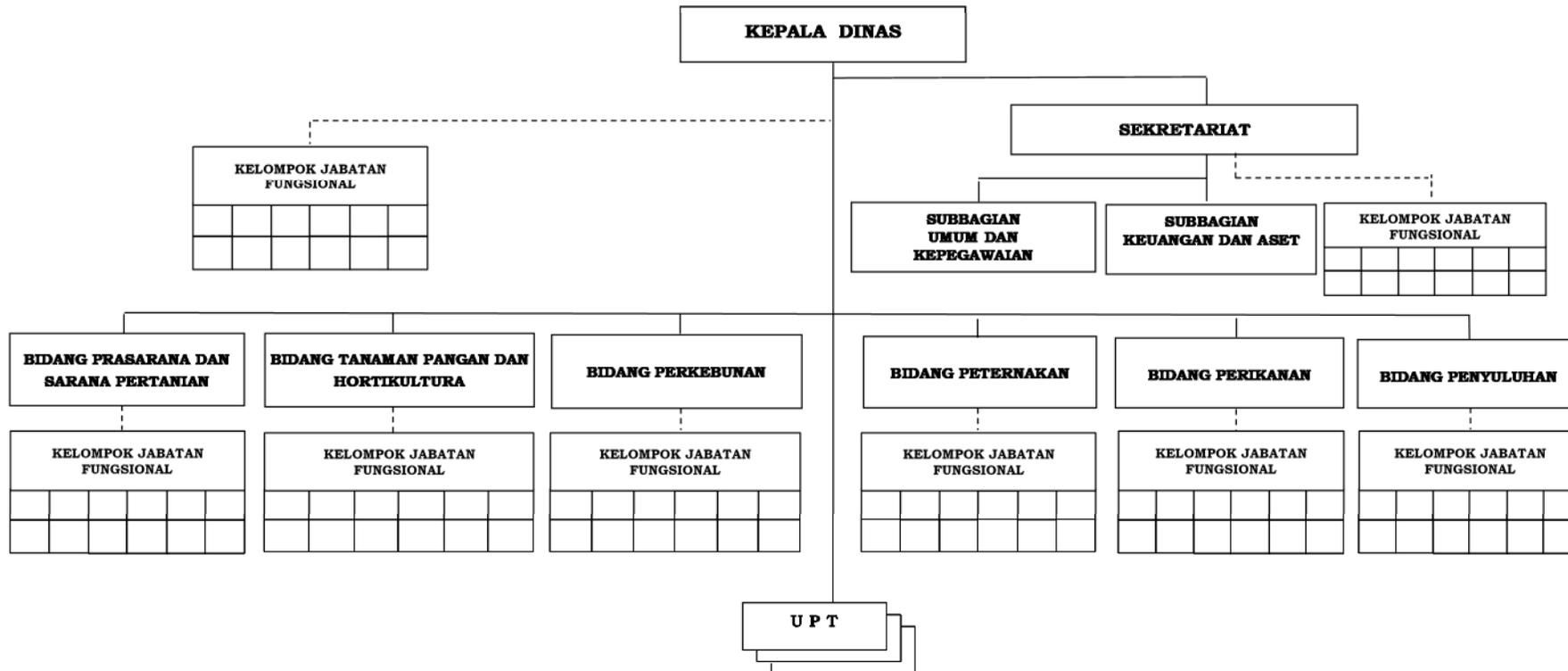
Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
LAMANDAU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LAMANDAU



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lamandau



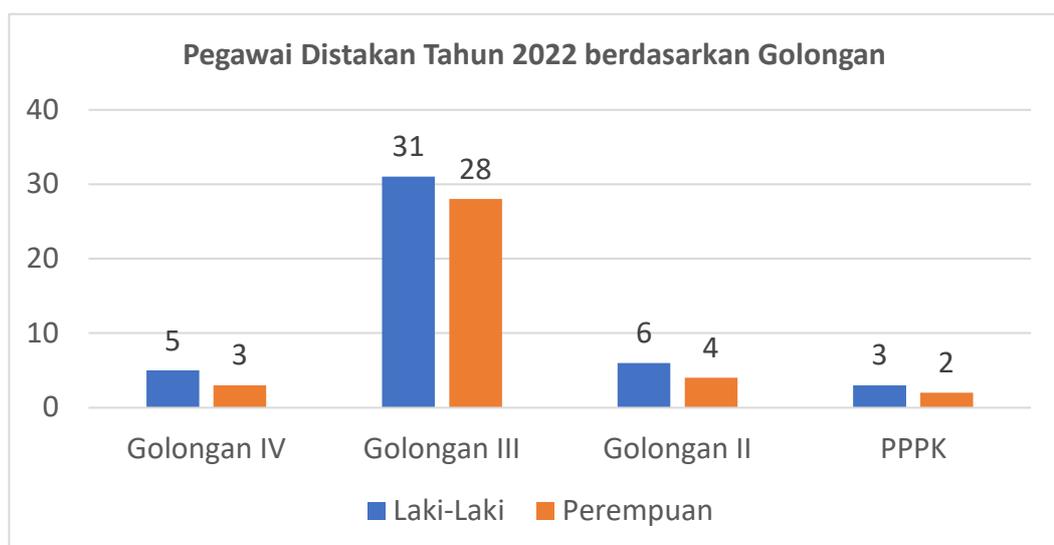
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan

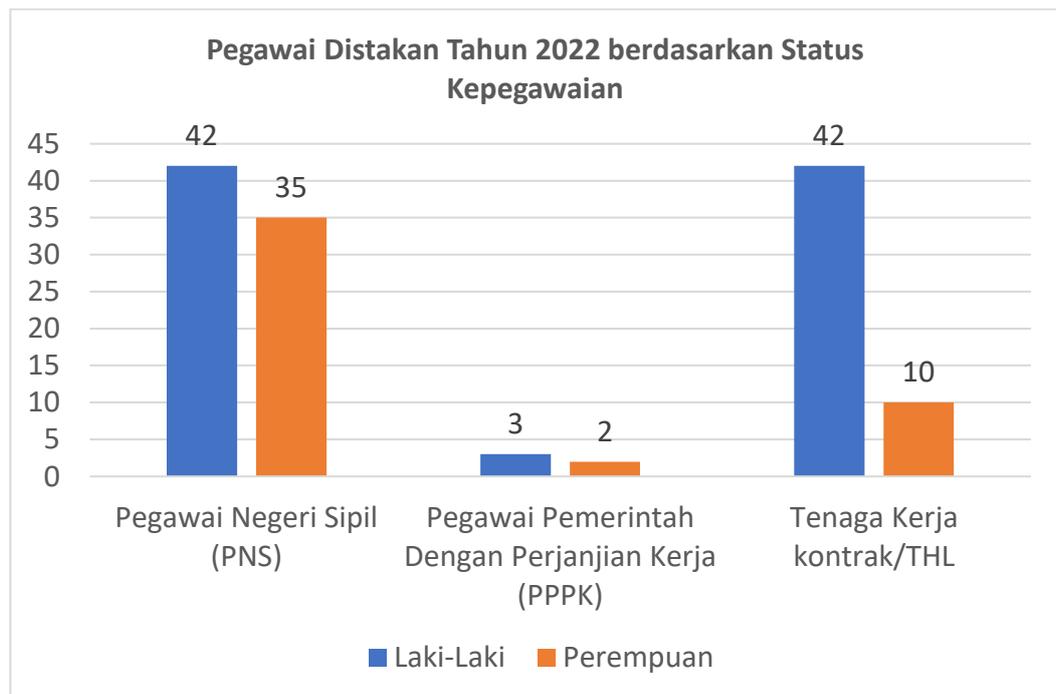
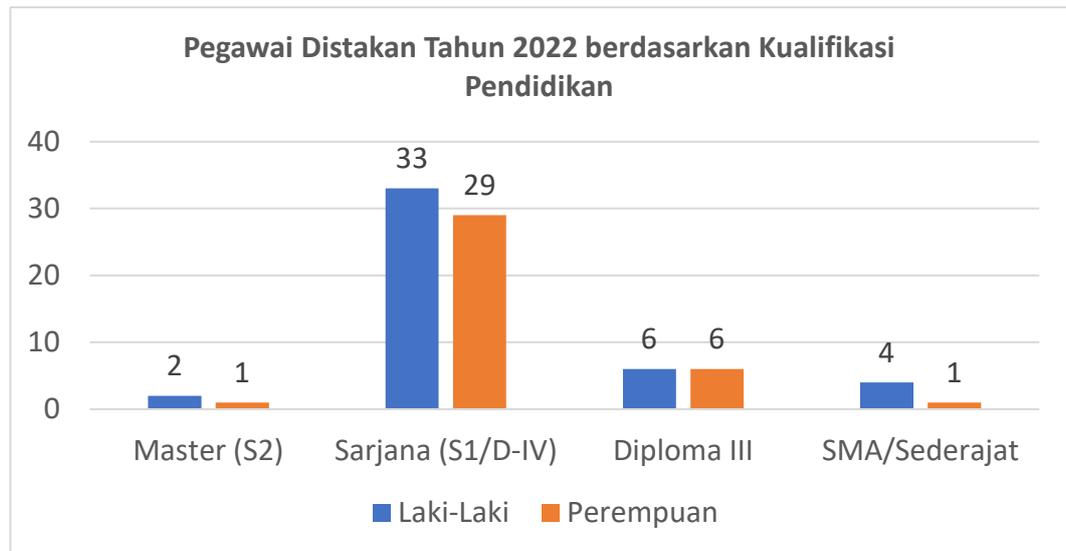
Pelaksanaan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pertanian dan Perikanan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perikanan

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai PNS sebanyak 77 orang, PPPK sebanyak 5 orang dan Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 52 orang dengan komposisi sebagai berikut :





b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten untuk menunjang pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
 Bidang : Bidang Pertanian
 Unit Organisasi : Dinas Pertanian dan Perikanan
 Sub Unit Organisasi : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
 U P B : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	68.430.980.161,13
1	TANAH	5.675.606.100,00
1.01	TANAH	5.675.606.100,00
2	PERALATAN DAN MESIN	11.865.769.190,50
2.01	ALAT BESAR	217.563.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	4.421.347.350,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	193.248.592,00
2.04	ALAT PERTANIAN	2.082.051.032,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.334.597.469,91
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	464.190.378,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	11.265.200,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	786.046.620,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	19.800.000,00
2.10	KOMPUTER	1.289.134.548,59
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	46.525.000,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	36.243.779.088,12
3.01	BANGUNAN GEDUNG	35.740.432.088,12
3.02	MONUMEN	425.617.000,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	77.730.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	13.759.947.582,51
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	5.034.968.072,00
4.02	BANGUNAN AIR	7.206.161.160,51
4.03	INSTALASI	751.602.650,00
4.04	JARINGAN	777.215.700,00
5	ASET TETAP LAINNYA	864.108.200,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	13.595.200,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0,00
5.03	HEWAN	832.183.000,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	18.330.000,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	11.770.000,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	11.770.000,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Halaman 1 dari 2

Printed By Sisd



Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Kondisi aset Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.3 sedangkan peralatan dan mesin disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Keragaan Aset Lingkup Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2022

No	Jenis	Unit	Asal	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	Beli	Baik
2	Komplek Balai Benih Ikan	23	Beli	Baik
3	Komplek Balai benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	21	Beli	Baik
4	Komplek Balai Pembibitan Ternak	15	Beli	Baik
5	Kompleks Balai Hortikultura Batu Kotam	4	Beli	Baik
6	Fasilitas UPTD Perkebunan	3	Beli	Baik
7	Fasilitas Penangkaran Rusa	4	Beli	Baik
8	Fasilitas Demplot Kebun Kopi	4	Beli	Baik
9	BPP Kecamatan Sematu Jaya	3	Beli	Baik
10	BPP Kecamatan Bulik	3	Beli	Baik
11	BPP Kecamatan Delang	3	Beli	Baik
12	BPP Kecamatan Mentobi Raya	2	Beli	Baik
13	BPP Kecamatan Belantikan Raya	2	Beli	Baik
14	BPP Kecamatan Batang Kawa	2	Beli	Baik
15	BPP kecamatan Bulik Timur	2	Beli	Baik
16	BPP Kecamatan Lamandau	2	Beli	Baik
17	Poskeswan	8	Beli	Baik
18	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	11	Beli	Baik
19	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	3	Beli	Baik
20	Lumbung pangan dan lantai jemur	4	Beli	Baik
21	Rumah Jaga dan Rumah kompos	1	Beli	Baik
22	Rumah Media dan Lokasi shading	1	Beli	Baik
23	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Permanen	1	Beli	Baik
26	Kandang Komunal	1	Beli	Baik



Tabel 2.4 Keragaan Peralatan dan Mesin Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2022

No	Jenis	Volume (unit)	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	1	
2	Sepeda motor	67	
3	Pick up	5	
4	Kendaraan roda tiga	8	
5	Tracktor 4 wheel	2	
6	Traktor tangan	9	
7	Power Threaser	3	
8	Alat pengukur curah hujan	1	
9	Pompa robin	1	
10	Mesin potong rumput	10	
11	Portable generator set	2	
12	Portablewater pump	2	
13	Mesin pencetak pellet	1	
14	Pompa air BBI	3	
15	GPS	4	
16	Mesin penggiling/penepung	1	
17	Mesin pengering	2	
18	Fotovol	1	
19	Alat deteksi birahi	8	Alat peternakan lain-lain
20	Tatooning forceps	7	Alat peternakan lain-lain
21	Trocar sapi (wooden)	6	Alat peternakan lain-lain
22	Drenching gun 30 ml	5	Alat peternakan lain-lain
23	Container semen beku	4	Alat peternakan lain-lain
24	Alat pemotong kuku	1	Alat peternakan lain-lain
25	Alat pemotong tanduk	1	Alat peternakan lain-lain
26	Alat pengolah pupuk organik	1	Alat processing lain-lain
27	Mesin granula pupuk organik	1	Alat processing lain-lain
28	Mesin pengayak	1	Alat processing lain-lain
29	Mesin penjahit karung	1	
30	Alat uji unsur pupuk	1	
31	Mesin diesel	1	
32	Hammer reflex	1	
33	Thermometer	1	
34	Soil tester	2	
35	Alat pengukur kadar air benih	2	
36	Mikroskop	1	
37	Generator set (lab scale)	1	
38	Motor boat	2	Pengawas perikanan
39	Handy talky	1 paket	Pengawas perikanan
40	Gerobak dorong	5	
41	pH meter	2	
42	Peralatan lab benih	1 paket	



No	Jenis	Volume (unit)	Keterangan
43	Alat pencacah hijauan pakan ternak	4	
44	Fish finder	1	
45	Fiber glass	14	
46	Peralatan sadap karet	1 paket	
47	Hi-blow	1	
48	Freezer	2	
49	Happa	4	
50	Serok	7	
51	Bak sortir	1	
52	Mesin pengaduk pakan	1	BBI
53	Jaring angkat	2	
54	Terpal	2	
55	DO water	2	
56	Water quality analyzer system	1	
57	Alat lab kualitas air dan tanah	1 paket	
58	Standar portable meter	1	BBI
59	Salinity conductivity/temperature	1	
60	Turbidity meter	1	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan maka Dinas Pertanian dan Perikanan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan. Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2019-2023 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja OPD berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Visi Kabupaten Lamandau pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2019-2023 adalah **"Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau Juara (Jujur, Unggul, Adil, Religius, dan Aman)"**.



Dalam periode tersebut diarahkan untuk dapat mewujudkan kondisi Kabupaten Lamandau “Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB”

Untuk menciptakan kondisi Kabupaten Lamandau yang sejahtera diperlukan kualitas pelayanan yang prima dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Hal tersebut tentunya didukung dengan kapasitas dan kuantitas SDM yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, regulasi dan kelembagaan yang kondusif, serta dukungan dari masyarakat.

Adapun visi diatas diterjemahkan melalui misi sebagai berikut yang dijabarkan dalam misi ketiga yaitu “**Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Kelestarian Lingkungan Hidup**” maka tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 yaitu **Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Dengan sasaran **Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan**. Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan yaitu pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan produktivitas tanaman hortikultura, meningkatnya produksi perkebunan, meningkatnya produksi peternakan, meningkatnya produksi perikanan, meningkatnya kualitas sdm pertanian (penyuluh dan petani), sinergitas antara pengembangan komoditas hingga aspek hilir, peningkatan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana aparatur, kapasitas aparatur. Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki tujuan dan sasaran serta indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan. Target dan realisasi indikator kinerja pada periode 2019-2023 tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau

No	Indikator	Target NSP K	IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indikator Kinerja Utama																		
1	Produksi Tanaman Pangan Padi				13.523,86	13.794,34				9.757,56	9.393,04				72,15%	68,09%			
	Produksi Tanaman Pangan Jagung				826,21	824,73				790,00	1.071,03				95,62%	127,09%			
	Produksi Tanaman Pangan Kedelai				127,89	130,45				0	0				0	0,00%			
	Produksi Tanaman Hortikultura Produksi sayur-sayuran				2.008,69	3.830,61				10.537,00	8.600,00				524,57%	224,51%			
	Produksi Tanaman Hortikultura buah-buahan				4.107,71	6.108,27				6.245,20	6.773,80				152,04%	110,90%			
	Produksi Perkebunan Sawit (CPO)				241.265,74	253.329,03				340.458,47	548.315,81				141,11%	216,44%			
	Produksi Perkebunan Karet				1.696,20	1.700,47				1.785,28	2.042,63				105,25%	120,12%			
	Produksi Peternakan Daging				438,58	447,35				515,60	519,57				117,56%	116,14%			
	Produksi Peternakan Telur				137,5	138,7				181,4	274				131,93%	197,55%			



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Indikator	Targ et NSP K	IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Produksi Perikanan Tangkap				647,13	659,49				643,10	636,74				99,38%	96,55%			
	Produksi Perikanan Budidaya				2.192,37	2.233,14				2.166,83	2.156,78				98,84%	96,58%			
	Jumlah Jenis Produk Olahan Pertanian				1	1				1,00	0				100,00%	0,00%			
	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan				1	1				1,00	0				100,00%	0,00%			
	Presentase Jumlah kelompok tani yang dibina				61,2	63,65				1,00	79,72				100,00%	125,25%			
	Produksi Tanaman Pangan Padi (ton)						9.674,79	9.965,03				6.946,78	4.975,00				71,8029022	71,80%	
	Produksi Tanaman Pangan Jagung (ton)						863,8	889,72				576,58	712,00				66,7492475	66,75%	
	Produksi Tanaman Pangan Kedelai (ton)						0	3,09				0	3,09				#DIV/0!	N/A	
	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar (Padi) (ku/ha)						32,95	33,15				32,53	32,53				98,7253414	98,73%	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Indikator	Target NSP K	IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Jagung) (ku/ha)						45	45,50				43,68	48,71				97,066 6667	97,07 %	
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Kedelai) (ku/ha)						0	15,44				0	15,44				#DIV/0!	-	
	Produktivitas Tanaman Hortikultura Sayur-sayuran (ton)						3.926,3 8	4.044,1 7				8954,15	2.106,0 5				228,05 1029	228,0 5%	
	Produktivitas Tanaman Hortikultura buah-buahan (ton)						6.260,9 8	6.448,8 1				18310,3 9	9.312,5 6				292,45 246	292,4 5%	
	Produksi Perkebunan Sawit (CPO) (ton)						259,91 5	278.10 9,67				553.798, 92	667.46 2,16				213069 ,242	213,0 7%	
	Produksi Perkebunan Karet (ton)						1.704,7 2	1.708,9 8				2.063,06	1.331,4 0				121,02 0461	121,0 2%	
	Produktivitas Perkebunan (Kelapa Sawit)						26,89	26,89				17,47	20,12				64,968 3897	64,97 %	
	Produktivitas Perkebunan (Karet)						3,84	3,84				1,17	0,87				30,468 75	30,53 %	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Indikator	Target NSP K	IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Produktivitas Perkebunan (Lada)						2,35	2,35				0,41	0,11				17,446 8085	17,45 %	
	Produksi Peternakan Telur (ton)						142,17	3,84				155,05	6.345,0 0				109,05 9577	109,0 6%	
	Populasi ternak khususnya sapi potong (ekor)						4.116	4,16				4,08	4.094,0 0				0,0991 2536	99,13 %	
	Produksi Daging (ton)						458,53	472,29				534,37	714,00				116,53 9812	116,5 4%	
												0,00					#DIV/0!		
	1. Produksi Perikanan budidaya (ton)						2170,1 2	2.232,4 9				2170,12	2.214,1 5				100	98,18 %	
	2. Produksi Perikanan Tangkap (ton)						726,39	662,59				726,39	689,10				100	110,7 3%	
	3. Jumlah Areal Pemeliharaan Ikan - Kolam (unit)						2.210,3 8	1.853,0 0				2010	2.185,0 0				90,934 5904	110,0 8%	
	4. Jumlah Areal Pemeliharaan Ikan - Keramba (unit)						656,03	845,00				885	949,00				134,90 2367	106,3 7%	
	5. Jumlah Produksi Budidaya Perikanan - Mas (ton)						1826	220,36				210,44	212,64				11,524 644	96,45 %	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No	Indikator	Target NSP K	IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	6. Jumlah Produksi Budidaya Perikanan - Nila (ton)						832	787,46				750,79	760,23				90,239 1827	96,30 %	
	7. Jumlah Produksi Budidaya Perikanan - Gurami (ton)						218,18	97,80				91,52	94,92				41,947 0162	94,52 %	
	8. Jumlah Produksi Budidaya Perikanan - Lele (ton)						779,66	523,22				508,48	528,40				65,218 172	100,1 0%	
	9. Jumlah Produksi Budidaya Perikanan - Patin (ton)						96,83	546,54				513,15	514,26				529,94 9396	94,83 %	
	1. Jumlah jenis produk olahan Pertanian (jenis)						2	2				2	2,00				100	100%	
	2. Jumlah jenis produk olahan perikanan (jenis)						2	2				2	3,00				100	100%	
	3. Persentase Jumlah Kelompok tani yang dibina (Persen)						67,47	72,86				71	32,37				105,23 1955	105,2 3%	
	4. Nilai Tukar Petani (persen)						99,25	99,5				131,07	117,09				132,06 0453	132,0 6%	



No	Indikator	Target NSP K	IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	5. Jumlah kelompok tani naik kelas (kelompok)						32	22				20	8,00				62,5	200%	



Produksi Pertanian dan Perikanan

Produksi Pertanian

Berikut Produksi Pertanian yang meliputi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan Kabupaten Lamandau Tahun 2022

No	PRODUKSI HASIL PERTANIAN	Produksi (ton)	Ket
1	Produksi Tanaman Pangan	11.392,08	
2	Produksi Hortikultura	17.660,28	
	• Sayur-sayuran	4.315,72	
	• Buah-buahan	12.808,31	
	• Biofarmaka	536,25	
3	Produksi Perkebunan	668.828,68	
4	Produksi Peternakan	1.020,79	
	• Telur	306,956	
	• Daging	713,831	
TOTAL		698.901,83	

Sumber data: Statistik Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau

Produksi Tanaman pangan

Tabel 2.7 Produksi pertanian tanaman pangan (ton) Kab. Lamandau Tahun 2018-2022

No	Jenis Komoditas	Produksi Tanaman Pangan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	7.408,53	8.663,00	9.393,04	6.946,78	5004,74
2	Jagung	215,14	760	1071,03	576,58	712,14
3	Kedelai	58	0	0	0	3,088
4	Ubi Kayu	288,31	5948	6644,46	3.935,69	5129,92
5	Ubi Jalar	43,37	891	960,88	484,34	723,265
6	Kacang Hijau	1,86	0	0	0	0
7	Kacang tanah	40,03	73	65,46	30,06	35,48
8	Talas	0	598	420,81	62,4	109,75
	Jumlah	8.055,24	16.933,00	18.555,68	12.035,85	11.392,08

Sumber data: Statistik Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau



Faktor Pendukung

1. Padi merupakan komoditi strategis yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Mencermati data perkembangan produksi setiap tahunnya bahwa kebutuhan konsumsi masyarakat akan padi/beras selalu mengalami peningkatan, hal ini sebagai pengaruh dari peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau. Untuk mengimbangi penyediaan pangan pokok masyarakat dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk ini diperlukan peningkatan dari produksi tanaman pangan.
2. Adanya Bantuan Pemerintah baik melalui APBD maupun APBN berupa Bantuan Sarana Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang yaitu berupa Pupuk, Obat-obatan, benih ke setiap Kelompok sesuai prioritas kebutuhan per tahun.
3. Pendampingan oleh Petugas pengelola Pangan/Penyuluh Pertanian.

Faktor Penghambat

1. Adanya alih komoditi dari pangan ke non pangan.
2. Tidak ada regenerasi petani pangan sehingga berkurangnya jumlah petani di Kabupaten Lamandau.
3. Hasil Padi yang ada orientasinya bukan komersil yaitu khusus konsumsi di masing-masing petani.
4. Harga jual pupuk yang meningkat/mahal.
5. Alih fungsi lahan dan alih komoditas dari tanaman pangan menjadi komoditas perkebunan yang lebih menguntungkan secara ekonomi bagi petani.
6. Secara ekonomi komoditi tanaman pangan terutama padi bukan diproduksi untuk diperjual belikan tapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan sendiri.
7. Berkurangnya jumlah petani karena petani dominan berusia lanjut dan kurangnya minat generasi muda untuk bertani.
8. Terbatasnya luas lahan potensial yang memenuhi syarat teknis untuk pengembangan kawasan persawahan sebagai sentra pertanian di Kabupaten Lamandau karena secara topografi didominasi perbukitan.
9. Produksi padi di Kabupaten Lamandau sebagian besar dari pengembangan budi daya padi lahan kering yang produktivitasnya relatif rendah.
10. Perubahan iklim dan tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).



11. Lahan sawah yang ada kurang produktif dan keterbatasan sumber air.
12. Belum optimalnya Indeks Pertanaman (IP) atau hanya sekali setahun.

Upaya Saran Perbaikan/Solusi :

Dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, adalah ;

1. Optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) sebagai efisiensi penggunaan tenaga kerja.
2. Bantuan sarana produksi padi sawah dan padi lahan kering.
3. Adanya dukungan, pembinaan dan pelatihan bagi petani dalam upaya peningkatan SDM.
4. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (pembangunan sumber air/irigasi teknis, jalan usaha pertanian)
5. Ketersediaan sumber genetik/bibit unggul lokal.
6. Mengupayakan mengaktifkan kembali sawah-sawah yang kurang produktif.
7. Mendorong peningkatan Indeks Pertanaman Padi Sawah dari IP-100 menjadi IP-200
8. Mendorong kegiatan Tanam Serentak Padi dan dukungan pencegahan dan penanganan serangan OPT.

Produksi Hortikultura

Tabel 2..8 Produksi Komoditas Hortikultura – Sayur-sayuran Kabupaten Lamandau Tahun 2017-2022

No	Komoditas	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bayam	178,50	161,80	102,40	313,50	231,64	201,3
2	Cabai Rawit	451,90	326,60	86,10	976,90	865,47	338,85
3	Cabai Besar	9,00	7,80	3,20	15,50	3,5	0,5
4	Cabai Keriting	-	-	-	-	73,5	2,7
5	Kacang Panjang	536,90	580,00	231,80	1.132,20	903,33	290,8
6	Kangkung	335,10	272,40	190,00	721,60	505,05	549,85
7	Mentimun	1.050,50	808,00	343,00	1.393,20	939,08	366,89
8	Buncis	364,50	364,50	130,80	969,40	860,3	241,4
9	Terong	576,80	511,00	146,70	1.346,10	984,256	304,57
10	Tomat	483,40	483,40	177,40	853,20	830,212	207,3
11	Sawi/Petsai	364,50	364,50	202,80	577,20	504,0	548,9
12	Bawang Merah	576,80	577,30	1,20	23,50	0	30,75
13	Bawang Daun	483,40	483,40	61,00	255,00	139,0	122
14	Labu Siam	-	-	6,80	23,30	20,6	5,5
15	Jamur tiram	-	-	-	-	5,05	0



No	Komoditas	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
16	Petai	-	-	10,90	44,90	144,54	85,48
17	Jengkol	-	-	1657,90	318,50	1.944,62	1.018,93
	TOTAL	5.411,30	4.940,70	1.683,20	8.600,60	8.954.15	4.315,72

Sumber data: Statistik Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau

Untuk data produksi hortikultura sayuran sumber data dari bulan Januari s/d November 2022, untuk bulan Desember masuk laporan Statistik Pertanian bulan Januari 2023

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Adanya Bantuan Sarana Produksi Sayur yaitu berupa Pupuk, Obat-obatan, benih ke setiap Kelompok sesuai prioritas kebutuhan per tahun
2. Pendampingan oleh Petugas pengelola Pangan/Penyuluh Pertanian
3. Perkembangan produksi sayuran meningkat signifikan disebabkan iklim/cuaca yang sangat mendukung untuk kegiatan budidaya, pemasaran produk tidak ada kendala dikarenakan meningkatnya jumlah permintaan pasar.
4. Produksi hortikultura (Buah-buahan dan sayur-sayuran) harus berorientasi pasar supaya petani mendapat kepastian harga dan pemasaran.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya akses pemodal di masyarakat
2. Kecenderungan masyarakat yang tidak membeli sayuran dari hasil panen masyarakat, sehingga kalah dengan hasil panen dari luar daerah Lamandau.

Usul saran Perbaikan/Solusi :

1. Perencanaan produksi hortikultura harus berbasis kebutuhan pasar, bukan sebaliknya pasar yang dipaksa membeli apa yang bisa diproduksi.
2. Perlu melakukan pendampingan bagi petani mulai dari penanaman, perawatan, panen, pengepakan, distribusi hingga pemasarannya.
3. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan melalui Kegiatan Pengembangan sistem informasi harga pasar terhadap komoditi pertanian. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi harga komoditas kelompok padi/beras, kelompok palawija, kelompok sayur mayur, kelompok buah-buahan dengan melakukan survey harga di Pasar Induk Nanga Bulik secara periodik.



Tabel 2.9 Produksi Komoditas Hortikultura – Buah-buahan Kabupaten Lamandau Tahun 2017-2022

No	Komoditas	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mangga	38,00	454,70	8,40	106,10	466,02	152,58
2	Rambutan	354,40	441,00	105,10	657,60	2.430,86	319,89
3	Duku/Langsat	28,40	79,80	99,50	339,80	333,02	0,00
4	Durian	117,80	1.100,20	179,30	737,50	1.728,91	126,61
5	Jambu Air	50,20	25,90	9,70	81,90	145,99	133,35
6	Pepaya	98,30	131,20	48,70	88,00	1.464,44	1.516,08
7	Pisang	5.083,00	1.536,00	354,30	1.154,30	4.479,95	4.607,56
8	Nangka/cempedak	138,30	669,00	634,50	872,80	2.986,56	1.654,47
9	Nenas	-	-	47,30	7,40	233,94	316,09
10	Manggis	24,00	25,70	23,90	20,90	237,03	7,90
11	Sukun	37,90	37,90	18,30	20,10	57,60	15,97
12	Melinjo	-	-	6,10	-	884,97	632,53
13	Semangka	-	-	-	1.724,40	1.098,0	899,4
14	Melon	-	-	-	229,00	48,1	0
15	Jambu Biji	-	-	20,80	81,90	377,41	424,65
16	Salak	-	-	179,50	33,40	158,65	200,32
17	Jeruk Besar/pamelo	-	-	13,60	81,90	87,76	101,58
18	Jeruk siam/keprok	-	-	16,60	81,90	521,91	1.149,19
19	Jeruk lemon	-	-	-	-	16,38	18,69
20	Buah naga	-	-	-	-	126,21	81,13
21	lengkeng	-	-	-	-	9,22	38,71
22	Sirsak	-	-	9,90	12,30	103,23	52,25
23	Alpukat	-	-	4,30	6,70	42,1	49,42
24	Belimbing	-	-	6,30	22,30	140,24	136,55
25	Sawo	-	-	15,70	50,20	131,91	173,39
	TOTAL	5.970,30	4.501,40	3.470,60	6.773,80	18.310,39	12.808,31

Sumber data: Statistik Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau

Perkembangan produksi buah-buahan meningkat signifikan disebabkan iklim/cuaca yang sangat mendukung untuk kegiatan budidaya, pemasaran produk tidak ada kendala dikarenakan meningkatnya jumlah permintaan pasar.

Faktor Pendukung

1. Adanya Bantuan Sarana Produksi Buah-Buahan yaitu berupa Pupuk, Obat-obatan, benih ke setiap Kelompok sesuai prioritas kebutuhan per tahun
2. Pendampingan oleh Petugas pengelola Pangan/Penyuluh Pertanian



3. Pemasaran Jelas

Faktor Penghambat

1. Kurangnya akses pemodal di masyarakat
2. Cuaca/musim yang menyebabkan jumlah produksi buah-buahan tertentu misalnya Durian, langsung, cempedak dll yang menurun di Kab. Lamandau.
3. Produksi hortikultura (Buah-buahan dan sayur-sayuran) harus berorientasi pasar supaya petani mendapat kepastian harga dan pemasaran hasil produksi.

Saran/rekomendasi/Solusi :

1. Perencanaan produksi hortikultura harus berbasis kebutuhan pasar, bukan sebaliknya pasar yang dipaksa membeli apa yang bisa diproduksi.
2. Perlu melakukan pendampingan bagi petani mulai dari penanaman, perawatan, panen, pengepakan, distribusi hingga pemasarannya.

Biofarmaka

Tabel 2.10 Produksi Komoditas Hortikultura – Biofarmaka Kabupaten Lamandau Tahun 2017-2022

No	Jenis Komoditas	Produksi Tanaman Pangan	
		2021	2022
1	Jahe	268.00	243.50
2	Jeruk Nipis	3.03	7.64
3	Kapulaga	0.03	0.00
4	Kencur	18.14	21.86
5	Kunyit	31.76	25.14
6	Laos/Lengkuas	33.64	26.88
7	Lempuyang	7.16	7.28
8	Lidah Buaya	0.03	1.80
9	Mahkota Dewa	35.50	82.80
10	Mengkudu/Pace	8.07	6.34
11	Sambiloto	0	0.00
12	Serai	35.22	98.00
13	Temuireng	3.95	5.28
14	Temukunci	0.05	0.00
15	Temulawak	10.30	9.73
	Jumlah	454.88	536.25

Sumber data: Statistik Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau



Produksi Perkebunan

Tabel 2.11 Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Lamandau Tahun 2022

No	Komoditas	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kelapa	72,51	75,46	74,98	75,22	20,65
2	Karet	1.632,64	1.787,78	2.042,63	1.807,15	1.331,40
3	Kelapa Sawit :				553.798,92	667.462,16
	Kebun Rakyat	55.446,50	91.081,45	105.560,23	106.513,38	110.294,78
	PBS	-	412.912,00	442.755,58	463.101,65	557.167,380
4	Kopi	31,09	31,09	36,28	28,02	0,82
5	Lada	6,72	6,72	8,60	5,28	5,28
6	Kakao	0,50	0,50	0,40	0,39	0,39
7	Pinang	15,84	15,84	17,43	1,00	5,29
8	Aren	0,21	0,21	0,45	0,35	2,69
9	Kemiri	-	-	-	-	-
	TOTAL	57.206,01	505.911,05	550.496,58	571.532,44	668.828,68

Sumber data: Statistik Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau

Faktor Pendorong Produksi Kelapa Sawit

1. Adanya program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) secara gratis kepada kelompok tani atau koperasi
2. Pengadaan Sarpras jalan menuju kelapa sawit dan pupuk
3. Pendataan Kebun Kelapa Sawit Rakyat melalui kegiatan STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya)
4. Relatif meningkat seiring dengan peningkatan luas tanaman menghasilkan (TM) dari tanaman yang belum menghasilkan (TBM). Peningkatan produksi Tandan Buah Segar (TBS) disertai dengan penambahan jumlah pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Lamandau, sehingga meningkatkan daya saing pekebun. Pembinaan dan pendampingan kelembagaan petani kelapa sawit tetap perlu ditingkatkan.

Faktor Penghambat

1. Luas tanaman yang menghasilkan mengalami peningkatan sehingga berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit
2. Adanya peralihan luas TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) ke TM (Tanaman menghasilkan)
3. Adanya peningkatan harga bibit yang bersertifikat dan Adanya penggunaan bibit yang tidak bersertifikat



4. Adanya peredaran bibit sawit palsu/ilegal
5. Kurangnya Pengetahuan masyarakat mengenai budidaya tanaman kelapa sawit yang optimal.

Produksi Peternakan

Tabel 3.12. Produksi Telur (kg) Kabupaten Lamandau per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis			Jumlah
		Ayam Buras	Itik	Ayam Petelur	
1	Bulik	13.564	7.443	125,143	21.132
2	Sematu Jaya	13.036	19.245	6.257	38.538
3	Menthobi Raya	13.471	19.432	4.171	37.074
4	Bulik Timur	12.567	18.131	10.428	41.126
5	Lamandau	8.547	4.907	0	13.454
6	Belantikan Raya	6.907	4.878	0	11.785
7	Delang	6.820	4.512	0	11.332
8	Batang Kawa	3.752	3.744	0	7.496
Tahun 2022		78.664	82.292	146.000	306.956
Tahun 2021		78.563	70.384	1.401.600	1.550.547
Tahun 2020		78.530	82.372	98.029	258.931
Tahun 2019		78.811	82.348		161.159
Tahun 2018		60.033	109.360		169.393
Tahun 2017		58.388	81.400		139.788

Sumber data: Statistik Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau

Analisa Data Produksi Telur

Produksi Telur (kg) Kabupaten Lamandau per Kecamatan Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun capaian kinerja sangat tinggi yaitu 209,62 persen.

Faktor Pendorong

1. Pendistribusian ternak itik dan ayam buras.
2. Meningkatnya peternak ayam ras petelur skala kecil.
3. Adanya tawaran kerjasama dari perusahaan untuk pengembangan ayam ras petelur.

Faktor Penghambat/Kendala

1. Kurangnya akses permodalan peternak
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengembangkan ayam ras petelur
3. Kurangnya pengetahuan peternak dalam penanganan kesehatan hewan khususnya unggas.



4. Usaha ayam ras petelur di Kabupaten Lamandau tidak bisa berkembang secara optimal yang berdampak pada belum mampu memenuhi kebutuhan daerah secara kontinyu karena peternak dihadapkan pada keterbatasan permodalan serta belum terjalannya kerjasama optimal dan kesepakatan antara peternak dengan perusahaan dibidang peternakan khususnya perunggasan dalam hal ini ayam ras petelur.

Saran rekomendasi/Solusi

Pemerintah Daerah telah memfasilitasi agar adanya kerjasama/kemitraan antara kelompok peternak/peternak mandiri dengan CV. CIOMAS salah satu anak perusahaan PT. Chaaron Pokpan yang bergerak dalam bidang budidaya peternakan dengan sistem bagi hasil. Namun kendala jarak lokasi relatif jauh dan ketersediaan akses jaringan listrik ke lokasi peternak yang berminat belum ada.

Produksi Daging

Tabel 2.13 Produksi Daging (kg) per Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Ternak (kg)							Jumlah
		Sapi Potong	Kambing	Babi	Ayam Petelur	Ayam Buras/Potong	Ayam Ras/Pedaging	Itik/Manila	
1	Bulik	65.431	1.328	3.275	-	739	528.945	99	599.817
2	Sematu Jaya	15.310	683	747	-	699	6.375	121	23.935
3	Menthobi Raya	7.413	417	1.321	-	774	3.750	132	13.807
4	Bulik Timur	5.640	240	1.723	-	677	38.250	122	46.652
5	Lamandau	1.772	26	2.011	-	454	2.250	26	6.539
6	Belantikan Raya	644	38	1.494	-	417	7.125	28	9.746
7	Delang	644	13	2.241	-	391	7.875	28	11.192
8	Batang Kawa	325	-	1.551	-	254	-	13	2.143
Tahun 2022		97.179	2.745	14.363	-	4.405	594.570	569	713,831
Tahun 2021		85.254	2.153	9.306	1.800	4.375	432.000	796	535.684
Tahun 2020		85.093	2.226	9.080	-	5.458	416.400	817	519.074
Tahun 2019		77.520	2.302	11.498	-	7.400	415.174	1.015	514.909
Tahun 2018		77.699	3.480	7.800	-	7.522	410.625	1.466	508.592
Tahun 2017		88.699	2.940	7.980	-	5.847	328.950	1.534	435.950

Analisa Data



Produksi Daging (kg) per Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian realisasi sebesar 151,14 persen.

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Adanya penambahan ayam petelur
2. Adanya Tempat Penangkaran yang menjual ke TPH dari Kelompok Tani/Peternak Tanah Merah dan Bukit Pandau hampir setiap hari penyuplai Daging
3. Kontribusinya lebih banyak ke Daging Ayam dan Sapi untuk pematangan.

Faktor penghambat Capaian

Khususnya ketersediaan daging sapi belum sepenuhnya mampu diproduksi dari Kabupaten Lamandau dikarenakan jumlah/populasi sapi yang semakin belum berkembang secara signifikan sehingga mendatangkan atau membeli di luar daerah.

Usul/Saran Rekomendasi

Sebagai bagian dari Revitalisasi Pertanian meningkatkan produksi dan ketahanan pangan/kecukupan pupuk maka pembangunan peternakan Lamandau diharapkan dapat :

1. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak serta terpenuhinya kebutuhan konsumsi hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan daya saing, mutu dan nilai tambah komoditas peternakan bagi kesejahteraan dan kemandirian peternak sehingga dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) khususnya Peternakan.
3. Peningkatan peranan kelembagaan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan berdaya saing.
4. Meningkatkan teknologi pengolahan limbah peternakan sehingga dapat menurunkan krisis lingkungan seperti pengolahan pupuk organik dan pemanfaatan biogas.



Produksi Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya

Tabel 2.14 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Lamandau (ton) Tahun 2022

Kecamatan Subdistrict	Budidaya Laut Marine Culture	Tambak Brackish Water Pond	Kolam Fresh Water Pond	Keramba Cage	Jaring Apung Floating Cage Net	Sawah/ Mina Padi Paddy Field	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Bulik	0	0	214,98	239,24	478,48	0	923,70
2 Sematu Jaya	0	0	268,73	11,39	22,78	0	302,91
3 Menthobi Raya	0	0	182,74	37,97	75,95	0	296,66
4 Bulik Timur	0	0	139,74	26,58	53,16	0	219,49
5 Lamandau	0	0	43,00	26,58	53,16	0	122,74
6 Belantikan Raya	0	0	64,50	15,19	30,38	0	110,06
7 Delang	0	0	107,49	18,99	37,97	0	164,45
8 Batangkawa	0	0	53,75	3,80	7,59	0	65,14
Kabupaten Lamandau	0	0	1.074,92	379,74	759,49	0	2.214,15

Sumber Data: Statistik Dinas Pertanian dan Perikanan

Faktor Penghambat

Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Yang Inovatif, Produktif, lestari dan berkelanjutan:

1. Pelaku usaha yang bergerak budidaya ikan air tawar masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya yang tersedia.
2. Kualitas SDM pembudidaya ikan dalam manajemen usaha rata-rata rendah
3. Pencemaran air di kawasan perikanan budidaya
4. Pembudidaya ikan sangat tergantung dari pakan pabrikan dan harga relatif mahal.
5. Kemampuan aset dari pembudidaya dalam mengakses permodalan dari perbankan masih rendah.



6. Pembangunan dan pengembangan perikanan belum berjalan dengan baik dan optimal, masih terdapat masalah mendasar dan kendala di lapangan yang harus segera ditangani. Permasalahan tersebut antara lain :
 - Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan Kelompok Pembudidaya Ikan.
 - Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) belum berproduksi secara optimal.

Faktor Pendorong

1. Menumbuhkan pelaku usaha budidaya ikan air tawar karena potensinya masih bisa untuk dikembangkan.
2. Menyediakan benih ikan unggul untuk Pembudidaya Ikan
3. Pemerintah Daerah telah melakukan pendampingan dan pembinaan aspek teknis budidaya dan memfasilitasi pelatihan pembuatan pakan.
4. Memberikan stimulan berupa bantuan benih dan pakan ikan bagi pembudidaya pemula.
5. Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan guna mengakses fasilitas pemerintah dan permodalan dari perbankan.
6. Pengembangan program Mina Padi

Saran/rekomendasi

1. Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan.
2. Melakukan sosialisasi dan pengawasan tentang sumberdaya ikan.
3. Penindakan kepada pelaku perusak lingkungan perairan (penuba/ penyetrum/pengguna bahan kimia beracun).
4. Membantu usaha penguatan modal pokdakan/masyarakat melalui kredit lunak (KUR Kan).
5. Mengoptimalkan Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) sehingga mampu memenuhi kebutuhan benih melalui pelatihan/magang.



Produksi Perikanan Tangkap (ton)

Tabel 3.15. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Lamandau (ton) Tahun 2021-2022

Kecamatan Subdistrict		Perikanan Laut <i>Marine Fisheries</i>		Perairan Umum <i>Inland Water</i>		Jumlah <i>Total</i>	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Bulik	0	0	145,28	137,82	145,28	137,82
2	Sematu Jaya	0	0	94,43	89,58	94,43	89,58
3	Menthobi Raya	0	0	54,48	51,68	54,48	51,68
4	Bulik Timur	0	0	58,84	55,82	58,84	55,82
5	Lamandau	0	0	105,33	99,92	105,33	99,92
6	Belantikan Raya	0	0	124,94	118,53	124,94	118,53
7	Delang	0	0	65,38	62,02	65,38	62,02
8	Batangkawa	0	0	77,72	73,73	77,72	73,73
Kabupaten Lamandau		0	0	726,39	689,10	726,39	689,10

Sumber Data: Statistik Dinas Pertanian dan Perikanan

Kendala :

Faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan ikan di Kabupaten Lamandau.

1. Masih ditemukannya praktek-praktek penggunaan alat tangkap yang merusak antara lain strum dan racun.
 - a. Belum mampu secara berkelanjutan untuk mempertahankan produksi ikan di perairan umum.
 - b. Masih terdapat penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kelestarian yaitu dengan menggunakan bahan yang dilarang seperti tuba, setrum dan bahan kimia beracun.
 - c. Lemahnya permodalan usaha kelompok nelayan ikan.

Solusi :

Upaya yang dilakukan :

1. Pembinaan kelompok nelayan dan bantuan jenis alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan;
1. Memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perairan (PokMasWas) Swadaya/Mandiri atau Kelompok Masyarakat Peduli Perikanan Swadaya/Mandiri.



2. Pemerintah daerah terus mendorong cara penangkapan ikan dengan metode yang ramah lingkungan, memberikan bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan, sosialisasi tentang illegal fishing.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.789.906.057	1.986.738.889				1.648.809.373	1.962.742.751				92,12	98,79				0,90	0,84
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.317.794.726	375.008.200				1.124.688.720	345.924.775				85,35	92,24				3,51	3,25
Program peningkatan disiplin aparatur	101.250.000	51.500.000				100.608.750	49.852.000				99,37	96,80				1,97	2,02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	135.625.363	40.600.000				109.377.345	40.593.364				80,65	99,98				3,34	2,69
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	450.150.000	121.210.000				367.742.551	80.425.000				81,69	66,35				3,71	4,57
Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	91.500.000	-				60.907.500	-				66,57	0,00				0,00	0,00
Program Peningkatan produksi tanaman pangan	2.062.036.491	644.087.308				1.695.299.956	639.797.598				82,21	99,33				3,20	2,65
Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	607.906.000	216.499.485				569.404.766	216.184.485				93,67	99,85				2,81	2,63
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	1.632.978.160	697.534.555				1.408.337.768	673.458.515				86,24	96,55				2,34	2,09
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.440.051.000	1.701.521.200				1.386.952.835	1.692.039.200				96,31	99,44				0,85	0,82
Program Pengembangan Perikanan	1.338.989.000	633.033.050				862.535.757	623.977.680				64,42	98,57				2,12	1,38
Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1.034.035.000	703.420.385				976.878.600	690.206.600				94,47	98,12				1,47	1,42
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			0	25.000.000	35.000.000			-	25.000.000				0	100,00		-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1069774314	1.095.451.421	840.186.797			1.058.157.500	1.000.434.670				98,91	91,33		1,27	1,06
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.159.032.557	8.037.023.656	10.801.602.940			9.577.987.108	7.774.874.163				94,28	96,74		0,94	1,23
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			2.177.798.705	2.240.994.001	4.497.536.440			2.095.885.670	2.158.819.281				96,24	96,33		0,48	0,97
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			2.151.318.363	678.200.000	1.661.028.500			2.132.853.100	676.621.700				99,14	99,77		1,30	3,15
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			211.092.872	314.632.332	351.310.999			209.110.000	299.238.641				99,06	95,11		0,60	0,70



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			128.013.762	238.129.984	168.024.213			128.005.000	237.628.484				99,99	99,79		0,76
PROGRAM PENYUYULUH PERTANIAN			850.573.495	764.390.508	1.504.159.777			660.363.300	642.942.450				77,64	84,11		0,57	1,03
JUMLAH	12.002.221.797	7.171.153.072	16.747.604.068	13.393.821.902	19.858.849.666	10.311.543.921	7.015.201.968	15.862.361.678	12.815.559.389	-	85,91	97,83	94,71	95,68	0,00	60,44	0,80



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Pertanian dan Perikanan dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau dalam hal pengembangan pelayanan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.

Kabupaten Lamandau merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan nilai dan kontribusi yang paling besar pada PDRB Kabupaten Lamandau. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Lamandau terdiri atas tujuh subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pengembangan pelayanan bertujuan untuk menentukan subsektor pertanian dan perikanan yang termasuk klasifikasi prima serta merumuskan alternatif strategi pengembangan yang dapat diterapkan dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Lamandau. Analisis data yang digunakan adalah Tipologi Klassen untuk menentukan klasifikasi masing-masing subsektor dan pemilihan prioritas subsektor yang akan dikembangkan serta Analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan.

Analisis SWOT menunjukkan subsektor pertanian dan perikanan yang termasuk klasifikasi prima berdasarkan Tipologi Klassen adalah perkebunan dan peternakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa subsektor perkebunan dan peternakan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan pertanian dan pembangunan perekonomian Kabupaten Lamandau sehingga dibutuhkan perumusan strategi pengembangan.

Strategi pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan antara lain peningkatan produksi, perluasan pasar,



akses permodalan, meningkatkan kelembagaan kelompok tani, membuka akses pasar bagi petani, pelatihan pengolahan hasil, dan perlindungan tanaman dari hama penyakit.

Strategi pada subsektor peternakan antara lain pemanfaatan Inseminasi Buatan dalam meningkatkan produksi ternak, pengembangan pemasaran, akses permodalan, pelatihan pengolahan hasil dan limbah peternakan, menjaga kesehatan hewan ternak, pengembangan usaha pembibitan dan penggemukan sapi, serta pengembangan inovasi terkait zat pertumbuhan ternak yang lebih aman.

Strategi pada subsektor perikanan antara lain Penyediaan sarana dan prasarana mendukung peningkatan produksi perikanan Tangkap, Penyediaan sarana dan prasarana mendukung produksi perikanan Budidaya.

NO.	URUSAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Belum optimalnya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dan Peningkatan kualitas SDM Pertanian serta Penguatan Kelembagaan Pertanian	Penyediaan sarana produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dan penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi
			Penyediaan prasarana pertanian
			Pengendalian zoonosis dan penyakit menular ternak
			Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian
			Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan	Belum Optimalnya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana mendukung peningkatan produksi perikanan Tangkap
			Penyediaan sarana dan prasarana mendukung produksi perikanan Budidaya

Tujuan – 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

Kemandirian ekonomi dimaknai sebagai kemampuan untuk mengelola sektor unggulan yang dimiliki hingga menjadi sumber ekonomi yang dapat mencapai kesejahteraan dan kemajuan daerah. Menguatkan kemandirian



ekonomi akan lebih baik jika dikaitkan dengan daya saing. Melalui daya saing yang kuat sektor unggulan dapat ditingkatkan dan dioptimalkan sehingga tidak mudah melemah dengan sektor unggulan daerah lain. Memperkuat kemandirian ekonomi juga merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan daerah, sehingga perekonomian dapat tumbuh dan berkembang merata diseluruh daerah.

Sektor unggulan di Kabupaten Lamandau meliputi sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian sendiri didominasi oleh produksi kelapa sawit yang besar dan mejadi sektor unggulan di Kabupaten Lamandau . Berbagai sektor unggulan perekonomian daerah tersebut akan dikembangkan tidak hanya didalam bentuk produk mentah saja, melainkan ditingkatkan pada industri pengolahan sehingga nilai jual dari produk unggulan tersebut menjadi lebih tinggi. Selain itu pengelolaan sektor unggulan juga akan dikembangkan kearah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan agar yang dapat menikmati hasil dari potensi alam tidak hanya generasi saat ini melainkan sampai generasi selanjutnya. Kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong daya saing ekonomi daerah dilakukan melalui peningkatan produktifitas ekonomi sektor unggulan, meningkatkan aktifitas ekonomi yang inklusif, menurunkan kesenjangan dan kemiskinan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai upaya didalam mencapai misi ke-3 Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan dan Kelestarian Lingkungan Hidup, maka ditetapkan tujuan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran **Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan**, dengan indikator yang diampu oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau : **PDRB (ADHK) Sektor Pertanian dan Perikanan;**

Lingkungan Internal

Kekuatan (Strength)

A. Organisasi

- (a) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau .



- (b) Peraturan Bupati Lamandau Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (c) Sumberdaya manusia di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau cukup memadai.
- (d) Sarana dan prasarana dan kelembagaan pendukung yang memadai.

B. Sistem Pertanian

- (a) Jumlah keluarga yang menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian dan perikanan di Kabupaten Lamandau cukup besar.
- (b) Lahan untuk kegiatan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan tersedia cukup luas.
- (c) Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lamandau untuk membangun pertanian dan perikanan berorientasi ekonomi kerakyatan .

Kelemahan (Weakness)

A. Organisasi

- (a) Kinerja organisasi masih belum optimal dilihat dari kinerja pegawai, kerjasama antara bidang, sistem informasi manajemen dari kabupaten ke kecamatan dan desa.
- (b) Kinerja balai-balai benih belum optimal sebagai pendukung peningkatan produksi pertanian dan perikanan
- (c) Terbatasnya jumlah dan mutu petugas pertanian dan perikanan di lapangan.

B. Sistem Pertanian dan Perikanan

- a) Lemahnya akses permodalan petani.
- b) Kurangnya alat mesin pertanian dan perikanan.
- c) Sistem produksi benih/bibit tanaman dan hewan belum berjalan dengan baik.
- d) Produksi dan Produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan masih rendah.
- e) Tingkat pendidikan SDM/Keterampilan petani dan nelayan masih rendah.
- f) Pengusahaan kegiatan pertanian dan perikanan masih bersifat subsistem sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan petani.



- g) Penguasaan dan penerapan teknologi pertanian dan perikanan oleh petani dan nelayan masih terbatas.
- h) Kegiatan *off-farm* (pengolahan hasil dan pemasaran) masih terbatas.
- i) Penyediaan modal bagi petani dan nelayan masih terbatas.

Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunity*)

- (a) Komitmen pemerintah daerah untuk membuka isolasi daerah melalui peningkatan jalan darat akan membuka peluang produk pertanian dan perikanan.
- (b) Areal potensial yang sesuai untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan tersedia luas.
- (c) Teknologi agrokimia (pupuk, pestisida, zat perangsang tumbuh), agrotomotif (alsintan), dan agrobiologi (varietas/klon unggul) tersedia luas untuk peningkatan produktivitas tanaman.
- (d) Pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan kebutuhan akan produk pangan dan daging/ikan baik dalam jenis, jumlah, dan mutu yang beragam.

Ancaman (*Threats*)

- (a) Dampak perubahan iklim global yang mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan.
- (b) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
- (c) Kebijakan import yang mengancam produksi petani dan nelayan
- (d) Peningkatan harga sarana produksi pertanian dan perikanan (pupuk, pakan & obat-obatan).
- (e) Harga produk pangan primer masih rendah.
- (f) Gangguan OPT yang tidak terduga dan bencana alam.
- (g) Pemotongan sapi betina produktif
- (h) Penangkapan ikan dengan cara yang dilarang (*illegal fishing*)
- (i) Peraturan pemerintah mengenai lingkungan semakin ketat.

Pemberlakuan kebijakan ekonomi global melalui AFTA, NAFTA, WTO dan lain-lainnya, akan menyebabkan persaingan dengan produk pangan impor.



**Tujuan 3 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan**

Sasaran 7: Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Merujuk sasaran berkenaan dengan meningkatnya daya saing sektor unggulan, maka strategi yang akan dibuat mengacu pada capaian data di tahun sebelumnya dan visi misi kepala daerah yang terpilih. Perlunya keterikatan ini agar strategi yang dibuat bisa sesuai dengan sasaran dan memberikan solusi yang tepat. Untuk itu akan disajikan ulang beberapa data mengenai keperluan dalam pembuatan strategi yang mengacu pada sasaran di atas.

Daya saing daerah memiliki arti sebagai kapasitas suatu daerah dalam upaya untuk menghadapi tantangan guna mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi dan stabil. Hal ini perlu dilakukan guna menciptakan perekonomian yang mampu berdaya saing dengan pihak luar. Oleh karena itu, indikator yang tepat untuk mengetahui bagaimana tingkat daya saing daerah dalam upaya peningkatan perekonomian daerah adalah melalui Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Industri Pengolahan dan Perdagangan terhadap PDRB, serta Persentase PAD terhadap pendapatan daerah.

Setelah melakukan pengkajian sasaran pembangunan periode sebelumnya dan gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis sektor unggulan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan yang tepat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk menghasilkan strategi pembangunan yang tajam dan tepat menggunakan metode SWOT (kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:



Tabel 3.4. SWOT Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none">1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah yang penuh terhadap peningkatan daya saing perekonomian daerah2. Masyarakat yang sangat cinta akan adat dan budaya lokal3. Produksi sektor perikanan Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan4. Jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan5. Jumlah produktivitas pertanian yang mengalami peningkatan6. Jumlah UKM yang mengalami peningkatan	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat belum mau mengelola potensi sumberdaya alam untuk dijadikan destinasi wisata2. Kontribusi sektor pertanian terhadap Perekonomian daerah (PDRB Sektor pertanian) yang mengalami penurunan3. Kontribusi sektor wisata terhadap PDRB yang mengalami penurunan
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none">1. Letak geografis Kabupaten Lamandau yang memiliki potensi besar pada sektor pariwisata berpotensi memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah2. Komitmen masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis sektor unggulan3. Peran serta sektor swasta dalam menumbuhkembangkan industri pertanian dan perkebunan sehingga mampu membantu perekonomian Kabupaten Lamandau	<ol style="list-style-type: none">1. Belum stabilnya pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor unggulan

Berdasarkan hasil analisis penyusunan SWOT yang didasarkan dari permasalahan dan isu strategis terkait sasaran meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis sektor unggulan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyilangan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal sehingga dapat menghasilkan beberapa strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau, maka Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian dan perikanan;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak serta benih ikan;
- e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- f. Pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan dan penyakit ikan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan hasil perikanan;
- j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;



- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian dan pengawasan izin perikanan;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan perikanan;
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perikanan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Urusan Pembangunan Daerah.

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Urusan	Permasalahan
1	Menjamin pola produksi, dan konsumsi pangan masyarakat yang berkelanjutan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Kurang optimalnya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dan Peningkatan kualitas SDM Pertanian serta Penguatan Kelembagaan Pertanian
		Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan	Kurang optimalnya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Kurang optimalnya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dan	Perlunya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kurang optimalnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			Kurang optimalnya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Peningkatan kualitas SDM Pertanian serta Penguatan Kelembagaan Pertanian		Kurang optimalnya Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
		Kurang optimalnya Penyediaan prasarana pertanian	Kurang optimalnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian
		Pengendalian zoonosis dan penyakit menular ternak	Kurang optimalnya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
		Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian	Perlunya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			
2	Belum Optimalnya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana mendukung peningkatan produksi perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		Penyediaan sarana dan prasarana mendukung produksi perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau memiliki keterkaitan dengan Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sasaran Meningkatnya produksi sektor Pertanian dan Perikanan dari Rencana Pembangunan Daerah



Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan terhadap pencapaian RPD Kabupaten Lamandau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kontribusi sektor pertanian terhadap Perekonomian daerah (PDRB Sektor pertanian)		
1	Produksi Daging	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penambahan ayam petelur 2. Adanya Tempat Penangkaran yang menjual ke TPH dari Kelompok Tani/Peternak Tanah Merah dan Bukit Pandau hampir setiap hari penyuplai Daging 3. Kontribusinya lebih banyak ke Daging Ayam dan Sapi untuk pemotongan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khususnya sapi yang susah itu karena porsi sapi yang semakin berkurang dan harus membeli di Madura untuk Sapi dan Populasi semakin berkurang
2	Konsumsi ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022. 2. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut. 3. Adanya program hari makan ikan yang sarannya ke anak2 sekolah untuk PAUD, SD yang menunjang Stunting di Lamandau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebiasaan beberapa orang yang tidak bisa makan ikan misalnya di satu suku di mendawai, kampung raja sehingga mempengaruhi konsumsi ikan di Lamandau.
3	Produksi Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022. 2. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga jual pakan di Kab. Lamandau yang meningkat. 2. Kendala di Kualitas Air yaitu pada saat menebar benih ikan dan juga curah hujan dapat berpengaruh. 3. Kualitas Benih Ikan juga berpengaruh karena unntuk mendukung produksi juga harus dengan benih ikan yang



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		menganggarkan dana tersebut	berkualitas khususny pada petani ikan (setiap individu) tidak melalui balai di Dinas Pertanian dan Perikanan. 4. Pengetahuan Petani yang kurang terkait produksi perikanan budidaya dan belum terdapat penyuluh perikanan di Kab, Lamandau. 5. Kurangnya akses permodalan di setiap Petani Ikan Individu di Lamandau
4	Produksi Perikanan Tangkap	1. Bantuan alat tangkap berupa jaring yang membantu nelayan 2. Beberapa Desa menganggarkan pengadaan jaring/jala dengan dana ADD di setiap Desa	1. Dampak harga BBM yang meningkat sehingga berpengaruh pada jarak/daya jelajah alat transportasi pada saat menangkap Ikan. 2. Adanya Nelayan/oknum masyarakat yang menangkap Ikan menggunakan alat tangkap yang berbahaya/melanggar misalnya Alat Setrum, Racun. 3. Belum adanya penindakan bagi pengguna alat tangkap yang berbahaya
5	Jumlah Areal Pemeliharaan Ikan (Kolam)	1. Adanya bantuan benih ikan yang memacu masyarakat untuk membuat Kolam	
6	Jumlah Areal Pemeliharaan Ikan (Keramba)		1. Pengaruh dari sisi kualitas air 2. Pada saat musim kemarau berpotensi adanya nelayan yang menangkap dengan cara meracun dll
7	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan(Mas)	1. Adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022. 2. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut	1. Dampak harga BBM yang meningkat sehingga berpengaruh pada jarak/daya jelajah alat transportasi pada saat menangkap Ikan 2. Adanya Nelayan/oknum masyarakat yang menangkap Ikan menggunakan alat tangkap yang berbahaya/melanggar misalnya Alat Setrum, Racun. 3. Belum adanya penindakan bagi pengguna alat tangkap yang berbahaya
8	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Nila)	1. Adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022.	1. Dampak harga BBM yang meningkat sehingga berpengaruh pada jarak/daya jelajah alat transportasi pada saat menangkap Ikan. 2. Adanya Nelayan/oknum masyarakat yang menangkap



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut	3. Ikan menggunakan alat tangkap yang berbahaya/melanggar misalnya Alat Setrum, Racun. 3. Belum adanya penindakan bagi pengguna alat tangkap yang berbahaya
9	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Gurami)	1. Adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022. 2. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut	1. Dampak harga BBM yang meningkat sehingga berpengaruh pada jarak/daya jelajah alat transportasi pada saat menangkap Ikan. 2. Adanya Nelayan/oknum masyarakat yang menangkap Ikan menggunakan alat tangkap yang berbahaya/melanggar misalnya Alat Setrum, Racun. 3. Belum adanya penindakan bagi pengguna alat tangkap yang berbahaya
10	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Lele)	1. Adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022. 2. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut	1. Dampak harga BBM yang meningkat sehingga berpengaruh pada jarak/daya jelajah alat transportasi pada saat menangkap Ikan. 2. Adanya Nelayan/oknum masyarakat yang menangkap Ikan menggunakan alat tangkap yang berbahaya/melanggar misalnya Alat Setrum, Racun. 3. Belum adanya penindakan bagi pengguna alat tangkap yang berbahaya
11	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Patin)	1. Adanya bantuan benih ikan rutin ke petani/nelayan sehingga tingkat konsumsi di desa meningkat yaitu dalam satu tahun 10-12 Kelompok. di tahun 2022 mengalami peningkatan bantuan benih kepada 15 kelompok di tahun 2022. 2. Adanya Pengadaan benih ikan di setiap Desa dengan dana ADD di tahun 2022 dengan setiap desa menganggarkan dana tersebut	1. Dampak harga BBM yang meningkat sehingga berpengaruh pada jarak/daya jelajah alat transportasi pada saat menangkap Ikan. 2. Adanya Nelayan/oknum masyarakat yang menangkap Ikan menggunakan alat tangkap yang berbahaya/melanggar misalnya Alat Setrum, Racun. 3. Belum adanya penindakan bagi pengguna alat tangkap yang berbahaya
12	Cakupan bina kelompok petani	1. Adanya penambahan sumber daya penyuluh pertanian sesuai dengan bidangnya	1. Jumlah Sumber Daya Penyuluh pertanian yang terbatas yaitu tahun 2022 sejumlah 31 orang dan Jumlah kelompok tani yang tercatat di data SIMLUHTAN tahun 2022 sebanyak 659 poktan yang idealnya 1 Penyuluh pertanian membina 1



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
			Desa/8 Kelompok Tani
13	Produktivitas Perkebunan (Kelapa Sawit)	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) secara gratis kepada kelompok tani atau koperasi2. Pengadaan Sarpras jalan menuju kelapa sawit dan pupuk3. Pendataan Kebun Kelapa Sawit Rakyat melalui kegiatan STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya)	<ol style="list-style-type: none">1. Luas tanaman yang menghasilkan mengalami peningkatan sehingga berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit2. Adanya peralihan luas TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) ke TM (Tanaman menghasilkan)3. Adanya peningkatan harga bibit yang bersertifikat dan Adanya penggunaan bibit yang tidak bersertifikat4. Adanya peredaran bibit sawit palsu/illegal5. Kurangnya Pengetahuan masyarakat mengenai budidaya tanaman kelapa sawit yang optimal
14	Produktivitas Perkebunan (Karet)	<ol style="list-style-type: none">1. Bantuan sarana prasarana produksi pasca panen dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng2. Adanya pembangunan unit pengolahan bokar (bahan olah karet) bersih di Desa Landau Kantu Kec. Delang	<ol style="list-style-type: none">1. Kendala harga karet cenderung menurun2. Bibit Karet yang digunakan bukan dari bibit unggul sehingga mempengaruhi produktivitas3. Tidak terlaksananya perawatan/pemeliharaan Karet
15	Produktivitas Perkebunan (Lada)	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Bantuan Bibit Lada2. Adanya Pendampingan dari Penyuluh Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Kendala harga jual lada yang fluktuatif2. Pemasaran lada yang belum optimal di Kab. Lamandau3. Pengaruh Bencana Banjir yang menyebabkan luasan tanaman lada berkurang
16	Populasi ternak khususnya sapi potong	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya pendistribusian ternak sapi sumber dana APBD 1 dan APBD2. Peningkatan prasarana dan sarana IB (Inseminasi Buatan)3. Bimbingan Teknis Petugas IB4. Pendistribusia Mesin Pengolahan Pakan5. Adanya kerja sama dengan perusahaan sawit perihal penyediaan bahan pakan ternak (Solid)6. Program Penanganan Kesehatan Hewan yang lebih baik7. adanya program nasional Sikomandan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Pemindahan ternak sapi milik perusahaan sawit CBI Group dari wilayah Kab. Lamandau ke Kab. Sukamara2. Kurangnya pengetahuan peternak perihal reproduksi ternak sapi3. Pemeliharaan ternak sapi yang masih sebagai sampingan dan tradisional4. Adanya wabah penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
17	Jumlah kelompok tani naik kelas	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan Dari Penyuluh Pertanian2. Adanya Pelatihan kepada Kelompok Tani/Petani	<ol style="list-style-type: none">1. Kelompok tani masih belum memenuhi persyaratan untuk naik kelas2. Rata-rata usia petani yang ada tidak lagi usia produktif / sudah usia lanjut3. Kondisi Kelompok tani di Kab.



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
			Lamandau yaitu kelas Pemula dan Lanjut
18	Produksi Padi	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Bantuan Sarana Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang yaitu berupa Pupuk, Obat-obatan, benih ke setiap Kelompok sesuai prioritas kebutuhan per tahun2. Pendampingan oleh Petugas pengelola Pangan/Penyuluh Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya alih komoditi dari pangan ke non pangan2. Tidak ada regenerasi petani pangan sehingga berkurangnya jumlah petani di Kab. Lamandau3. Hasil Padi yang ada orientasinya bukan komersil yaitu khusus konsumsi di masing-masing petani4. Harga jual pupuk yang meningkat/mahal
19	Produksi Jagung	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Bantuan Sarana Produksi Jagung yaitu berupa Pupuk, Obat-obatan, benih ke setiap Kelompok sesuai prioritas kebutuhan per tahun2. Pendampingan oleh Petugas pengelola Pangan/Penyuluh Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Alih Fungsi lahan terkait penanaman Jagung yang tidak setiap tahun2. Kurangnya pemasaran hasil jagung yaitu jagung pipilan untuk pakan. Selama ini skala pemasarannya masih kecil3. Harga jual jagung masih rendah di Kab. Lamandau
20	Produksi sawit - CPO	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah daerah memfasilitasi dengan membentuk tim untuk mengatasi gangguan usaha perkebunan2. Adanya peningkatan harga TBS (Tanaman buah segar) Kelapa Sawit	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Gangguan usaha perkebunan dari masyarakat sekitar perusahaan yang merasa belum mendapatkan hak dari perusahaan berupa plasma2. Penyampaian Laporan produksi sawit di perusahaan yang telat
21	Produksi Karet	<ol style="list-style-type: none">1. Bantuan sarana prasarana produksi pasca panen dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng2. Adanya pembangunan unit pengolahan boker (bahan olah karet) bersih di Desa Landau Kantu Kec. Delang	<ol style="list-style-type: none">1. Kendala harga karet cenderung menurun2. Bibit Karet yang digunakan bukan dari bibit unggul sehingga mempengaruhi produktivitas3. Tidak terlaksananya perawatan/pemeliharaan Karet
22	Produksi Telur	<ol style="list-style-type: none">1. Penndistribusian ternak itik dan ayam buras2. Meningkatnya peternak ayam ras petelur skala kecil3. Adanya tawaran kerjasama dari peusahaan untuk pengembangan ayam as petelur	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya akses permodalan peternak2. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengembangkan ayam ras petelur3. Kurangnya pengetahuan peternak dalam penanganan kesehatan hewan khususnya unggas
23	Produksi Buah-buahan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Bantuan Sarana Produksi Buah-Buahan yaitu berupa Pupuk, Obat-obatan, benih ke setiap Kelompok sesuai prioritas kebutuhan per tahun2. Pendampingan oleh Petugas pengelola	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya akses pemodaln di masyarakat2. Cuaca/musim yang menyebabkan jumlah produksi buah-buahan tertentu misalnya Durian, langsung, cempedak dll



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		Pangan/Penyuluh Pertanian 3. Pemasaran Jelas	yang menurun di Kab. Lamandau
24	Produksi Sayur-sayuran	1. Adanya Bantuan Sarana Produksi Sayur yaitu berupa Pupuk, Obat-obatan, benih ke setiap Kelompok sesuai prioritas kebutuhan per tahun 2. Pendampingan oleh Petugas pengelola Pangan/Penyuluh Pertanian	1. Kurangnya akses pemodal di masyarakat 2. Kecenderungan masyarakat yang tidak membeli sayuran dari hasil panen masyarakat, sehingga kalah dengan hasil panen dari luar daerah Lamandau.

Tabel 3.4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah - RPD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya pengembangan potensi daerah	1. Kurang berkembangnya sektor unggulan daerah secara inklusif melalui optimalisasi industri pengolahan pertanian, perkebunan, dan perikanan agar mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. 2. Belum adanya reformasi peraturan daerah tentang pengelolaan aset daerah agar lebih mengutamakan sektor unggulan dan pembangunan sektor bisnis yang lebih berwawasan lingkungan.	1. Belum optimalnyadaya saing daerahmelalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Kabupaten Lamandau sesuai RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Daftar Panjang Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lamandau berdasarkan Urusan Pembangunan

Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
Bidang Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam	1. Perekonomian; 2. Pertanian; 3. Perikanan;	Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	Optimalisasi penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen
			Optimalisasi kinerja kelembagaan pertanian
			Peningkatan produksi hortikultura



Bidang Pembangunan	Tema Pembangunan Prioritas	Urusan	Daftar Panjang Isu Strategis
			Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
			Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi peternak
			Peningkatan sosialisasi, pengawasan sumberdaya ikan dan pengendalian sumberdaya ikan
			Optimalisasi inovasi dan peralatan teknologi terapan pertanian

Isu Internal

Isu internal adalah permasalahan pertanian dan perikanan sesuai kondisi riil serta keadaan objektif daerah yang sedang terjadi. Teridentifikasi sebagai masalah bidang pertanian dan perikanan yang harus ditangani dan dituntaskan sesuai Visi dan Misi Pemerintah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Adapun isu strategis yang menjadi permasalahan adalah :

1. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan.

Permasalahan dalam infrastruktur Kabupaten Lamandau yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah meliputi permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup: masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan. Pertanian perlu didukung ketersediaan dan fungsionalnya sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mendorong agar sektor pertanian terus terpacu pertumbuhannya.

2. Masalah pengembangan ekonomi lokal.

Permasalahan bidang ekonomi menjadi isu utama perencanaan pembangunan Kabupaten Lamandau, menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografi, demografi, dan corak daerah yang paling mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

Permasalahan pada bidang pertanian dan perikanan antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran,



pengembangan industri hilir, pengembangan tata niaga komoditas, dan masih rendahnya investasi. Hal-hal yang menjadi fokus untuk dituntaskan antara lain:

- a. Pengelolaan pertanian dan perikanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional.
- b. Masih rendahnya produktifitas bidang pertanian dan perikanan.
- c. Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.

Isu Eksternal

Isu yang juga berdampak langsung terhadap permasalahan Bidang Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Lamandau , yang berasal dari luar Kabupaten Lamandau , antara lain Kerjasama perdagangan dunia yang bersifat global berpengaruh dan berimbas pada membanjirnya produk-produk impor yang menekan sistem perdagangan nasional dan berimbas pula pada perdagangan komoditas dan jenis produk pertanian di Kabupaten Lamandau .

Membanjirnya produk yang berasal dari hewani dan nabati seperti buah-buahan dan ternak import (daging) semakin menekan dan membuat hasil produksi petani dan peternak lokal tersaingi, sehingga akibatnya produk petani dan peternak semakin kompetitif dan bahkan kurang laku dipasaran.

Untuk menanggulangi persoalan tersebut maka perlu adanya kebijakan Pemerintah yang dapat memproteksi dan melindungi pengaruh pasar global terhadap perekonomian petani dan peternak khususnya di Kabupaten Lamandau . Kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu melakukan pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.

a. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Sustainable Development Goals (SDG's) yang menjadi bidang perhatian Dinas Pertanian dan Perikanan adalah tujuan 2 dan tujuan 8 yaitu tanpa kelaparan dan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan menurunnya sumber daya alam menjadi pemicu masalah kelaparan, kebutuhan akan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pertanian dan perikanan yang masih menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat Lamandau.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian dan Perikanan termasuk dalam Tujuan yakni **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup** dan Sasaran yakni **Meningkatnya produksi sektor Pertanian dan Perikanan**.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perikanan dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan 2024-2026

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Data Awal	Target Rencana Strategis			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup		Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen					
		Meningkatnya produksi sektor Pertanian dan Perikanan	PDRB (ADHK) Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	Juta Rupiah	1.190.897,98	1.202.806,96	1.214.835,03	1.226.983,38	3.644.625,37
			PDRB (ADHK) Sub Sektor Perikanan	Juta Rupiah	23.486,46	23.721,32	23.958,54	24.198,12	71.877,99



Tabel 4.2 *Logical Framework* Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau

LINGKUP KABUPATEN		LINGKUP KABUPATEN		LINGKUP PERANGKAT DAERAH							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	FORMULASI DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET INDIKATOR				
							KONDISI AWAL	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produksi sektor Pertanian dan Perikanan	PDRB (ADHK) Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1	Meningkatkan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	1. Produksi Tanaman Pangan (Ton/tahun)	Definisi: Produksi Tanaman Pangan adalah total produksi padi dan palawija yang dihasilkan dalam satuan ton/tahun; Kegunaan untuk melihat angka produksi daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk perumusan kebijakan di sub sektor tanaman pangan oleh pemerintah daerah; Interpretasi: Naik turunnya angka produksi adalah gambaran berhasil atau tidaknya program pemerintah dalam pengembangan di sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Definisi Operasional: Jumlah total produksi tanaman pangan berdasarkan jenis komoditas	11.392	11.449	11.506	11.564
						2. Produksi Hortikultura (Ton/tahun)	Definisi: Produksi Hortikultura adalah total produksi hortikultura (sayur, buah, biofarmaka) yang dihasilkan dalam satuan ton; Kegunaan untuk melihat angka produksi kabupaten yang selanjutnya akan digunakan untuk perumusan kebijakan di sub sektor hortikultura oleh pemerintah daerah; Interpretasi: Naik turunnya angka produksi adalah gambaran berhasil atau tidaknya program pemerintah dalam pengembangan di sektor pertanian khususnya hortikultura. Definisi Operasional: Jumlah total produksi hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran dan biofarmaka) berdasarkan per jenis golongan komoditas	17.660	17.837	18.015	18.195
						3. Produksi Perkebunan (Ton/tahun)	Definisi: Produksi Perkebunan adalah total produksi perkebunan yang dihasilkan dalam satuan ton; Kegunaan untuk melihat angka produksi kabupaten yang selanjutnya akan digunakan untuk perumusan kebijakan di sub sektor perkebunan oleh pemerintah daerah; Interpretasi: Naik turunnya angka produksi adalah gambaran berhasil atau tidaknya program pemerintah dalam pengembangan di sektor pertanian khususnya perkebunan. Definisi Operasional: Jumlah total produksi perkebunan berdasarkan per jenis komoditas	668.828	675.516	682.271	689.094



LINGKUP KABUPATEN		LINGKUP KABUPATEN		LINGKUP PERANGKAT DAERAH						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	FORMULASI DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET INDIKATOR			
							KONDISI AWAL	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					4. Produksi Peternakan (Ton/ton)	Definisi: Produksi Peternakan adalah total produksi peternakan (daging dan telur) yang dihasilkan dalam satuan ton; Kegunaan untuk melihat angka produksi kabupaten yang selanjutnya akan digunakan untuk perumusan kebijakan di sub sektor peternakan oleh pemerintah daerah; Interpretasi: Naik turunnya angka produksi adalah gambaran berhasil atau tidaknya program pemerintah dalam pengembangan di sektor pertanian khususnya peternakan. Definisi Operasional: Jumlah total produksi peternakan (daging dan telur) berdasarkan per jenis komoditas	1.021	1.031	1.041	1.052
			PDRB (ADHK)Sub Sektor Perikanan	2	Meningkatnya produksi perikanan	(1) Produksi Perikanan (Ton/Tahun) Definisi: Produksi Perikanan adalah total produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang dihasilkan dalam satuan ton; Kegunaan untuk melihat angka produksi perikanan kabupaten yang selanjutnya akan digunakan untuk perumusan kebijakan di sub sektor perikanan oleh pemerintah daerah; Interpretasi: Naik turunnya angka produksi adalah gambaran berhasil atau tidaknya program pemerintah dalam pengembangan di sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Definisi Operasional: Jumlah total produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap.	2.903	2.976	3.050	3.126



DRAFT LOGICAL FRAMEWORK (POHON KINERJA) DISTAKAN



Gambar 4.1 Cascading Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Perikanan selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.

Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Perikanan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN LAMANDAU 2024-2026				
Tujuan		: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup		
Indikator Tujuan		: Pertumbuhan Ekonomi		
Sasaran		: Meningkatkan produksi sektor Pertanian dan Perikanan		
Indikator Sasaran-1		: PDRB (ADHK) Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian		
Indikator Sasaran-2		: PDRB (ADHK) Sub Sektor Perikanan		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan PDRB (ADHK) Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Meningkatnya produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dan Peningkatan kualitas SDM Pertanian serta Penguatan Kelembagaan Pertanian	1. Penyediaan sarana produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dan penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi
				2. Penyediaan prasarana pertanian
		3. Pengendalian zoonosis dan penyakit menular ternak		
		4. Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian		
2. Meningkatnya produksi perikanan	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	5. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian		
		1. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung peningkatan produksi perikanan Tangkap		
				2. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung produksi perikanan Budidaya



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau. Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	kinerja kondisi awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Perangkat Daerah	
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan			(1) PDRB (ADHK) Sub Sektor Tanaman Pangan	Juta Rupiah	54.045,60	54.315,83		54.587,41		54.860,34		163.763,58			
				(2) PDRB (ADHK) Sub Sektor Hortikultura	Juta Rupiah	15.993,24	16.153,17		16.314,70		16.477,85		48.945,73			
				(3) PDRB (ADHK) Sub Sektor Perkebunan	Juta Rupiah	1.025.264,98	1.045.770,28		1.066.685,69		1.088.019,40		3.200.475,36			
				(4) PDRB (ADHK) Sub Sektor Peternakan	Juta Rupiah	80.875,33	81.684,08		82.500,92		83.325,93		247.510,94			
				(5) PDRB (ADHK) Sub Sektor Perikanan	Juta Rupiah	23.486,46	23.721,32		23.958,54		24.198,12		71.877,99			
		(1) Meningkatnya Produksi Pertanian			(1) Produksi Tanaman Pangan	Ton	11.392,08	11.449,04		11.506,29		11.563,82		34.519,14		
					(2) Produksi Hortikultura	Ton	17.660,28	17.836,88		18.015,25		18.195,40		54.047,54		
					(3) Produksi Perkebunan	Ton	668.828,00	682.204,56		695.848,65		709.765,62		2.087.818,84		
					(4) Produksi Peternakan	Ton	1.020,79	1.031,00		1.041,31		1.051,72		3.124,03		
		(2) Meningkatnya Produksi Perikanan			(1) Produksi Perikanan	Ton	2.903,25	2.965,49		3.029,19		3.094,38		9.089,06		
			DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN					19.026.136.383		19.092.727.860		19.159.552.408		57.278.416.651		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.125.224.046		999.724.046		1.256.224.046		3.381.172.138		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	689,1	695,991	50.000.000	702,95	50.000.000	709,98	50.000.000	2.108,92	150.000.000		



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja kondisi awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Perangkat Daerah
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah rumah tangga perikanan (RTP) tangkap (rumah tangga)	Rumah Tangga	549	555	50.000.000	560	50.000.000	570	50.000.000	570,00	150.000.000	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	30,00	150.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	2214,15	2269,50	1.075.224.046	2326,24	949.724.046	2384,40	1.206.224.046	6.980,14	3.231.172.138	
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	Kelompok	2	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	6,00	180.000.000	
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	Kelompok	2	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	6,00	180.000.000	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya rumah tangga perikanan (RTP) budidaya (rumah tangga)	Rumah Tangga	921	925	1.015.224.046	930	889.724.046	935	1.146.224.046	935,00	3.051.172.138	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Unit	190.020	1	537.952.530	1	412.452.530	1	668.952.530	3,00	1.619.357.590	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	Unit	24	10	477.271.516	10	477.271.516	10	477.271.516	30,00	1.431.814.548	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PERTANIAN					17.900.912.337		18.093.003.814		17.903.328.362		53.897.244.513	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah (Persen)	Persen	100	100	10.911.025.677	100	11.102.809.219	100	11.287.813.767	100	33.301.648.663	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja kondisi awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Perangkat Daerah
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/Bulan	84	84	8.140.603.992	84	8.269.426.337	84	8.401.469.240	252	24.811.499.569	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/Bulan	84	84	8.140.603.992	84	8.269.426.337	84	8.401.469.240	252	24.811.499.569	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Orang	5	6	142.300.000	6	142.300.000	6	142.300.000	18	426.900.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	1	1	92.300.000	1	92.300.000	1	92.300.000	3	276.900.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Orang	5	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	18	150.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah (bulan)	Bulan	12	12	884.604.159	12	833.565.356	12	779.527.001	36	2.497.696.516	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	3	9.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	12	12	384.677.143	12	229.577.143	12	69.577.143	36	683.831.429	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	12	12	10.970.000	12	10.970.000	12	10.970.000	36	32.910.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	12	12	17.753.340	12	17.753.340	12	17.753.340	36	53.260.020	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	453.203.676	12	557.264.873	12	663.226.518	36	1.673.695.067	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	1.516.712.526	12	1.516.712.526	12	1.516.712.526	24	4.550.137.578	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	12	12	500.000	12	500.000	12	500.000	36	1.500.000	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	kinerja kondisi awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Perangkat Daerah
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	133.155.000	12	133.155.000	12	133.155.000	36	399.465.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	1.383.057.526	12	1.383.057.526	12	1.383.057.526	36	4.149.172.578	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	226.805.000	12	340.805.000	12	447.805.000	24	1.015.415.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	Unit	1	1	20.695.000	1	20.695.000	1	20.695.000	1	62.085.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Unit	6	6	144.070.000	6	144.070.000	6	144.070.000	6	432.210.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Unit	12	12	27.040.000	12	27.040.000	12	27.040.000	36	81.120.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Unit	1	1	35.000.000	1	149.000.000	1	256.000.000	3	440.000.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) (ton)	Ton	698.901	712.521	3.907.047.971	726.411	3.822.055.906	740.577	3.632.055.906	2.179.510	11.361.159.783	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas lahan yang terfasilitasi bantuan sarana pendukung tanaman pangan dan hortikultura (Ha)	Ha	220	220	2.181.568.921	220	2.011.568.921	220	2.011.568.921	660	6.204.706.763	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	Laporan	1	1	1.146.008.335	1	1.146.008.335	1	1.146.008.335	3	3.438.025.005	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	kinerja kondisi awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Perangkat Daerah
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Laporan	1	1	1.035.560.586	1	865.560.586	1	865.560.586	3	2.766.681.758	
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi benih pertanian - tanaman pangan (ton)	Ton	9,5	10	1.725.479.050	11	1.810.486.985	12	1.620.486.985	33	5.156.453.020	
				Jumlah Produksi benih pertanian bibit hortikultura (pohon)	pohon	1800	1900		2.000,00		2.100,00		6.000	-	
				Jumlah Produksi produksi demplot perkebunan kopi & karet (Kg)	Kg	412	450		475,00		500,00		1.425	-	
				Jumlah Produksi bibit ternak sapi (ekor)	Ekor	25	27		29		31		87	-	
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	1	1	348.204.850	1	283.212.785	1	283.212.785	3	914.630.420	
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	763.228.191	1	1.288.228.191	1	1.138.228.191	3	3.189.684.573	
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	614.046.009	1	239.046.009	1	199.046.009	3	1.052.138.027	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun	Unit	5	5	1.662.578.500	5	1.827.878.500	5	1.643.198.500	15	5.133.655.500	BID PSP
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapat fasilitas prasarana pertanian (Poktan)	Kelompok	5	5	1.662.578.500	5	1.827.878.500	5	1.643.198.500	15	5.133.655.500	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Unit	5	5	1.662.578.500	5	1.827.878.500	5	1.643.198.500	15	5.133.655.500	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	kinerja kondisi awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Perangkat Daerah
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	Kasus	132	125	351.310.999	120	351.310.999	115	351.310.999	115	1.053.932.997	BID NAK
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/keurahan yang mendapat fasilitasi vaksinasi hewan dan pengobatan ternak secara massal (desa)	Desa	23	24	351.310.999	25	351.310.999	26	351.310.999	75	1.053.932.997	
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	Laporan	1	1	351.310.999	1	351.310.999	1	351.310.999	3	1.053.932.997	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah luasan serangan OPT tanaman pangan yang mendapat fasilitasi penanganan serangan OPT (Ha)	Ha	60	40	228.024.213	40	228.024.213	40	228.024.213	120	684.072.639	
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang difasilitasi penanggulangan OPT (Ha)	Ha	60	40	228.024.213	40	228.024.213	40	228.024.213	120	684.072.639	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	Ha	60	40	75.964.213	40	75.964.213	40	75.964.213	120	227.892.639	
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	Ha	4	4	152.060.000	4	152.060.000	4	152.060.000	12	456.180.000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang naik kelas	Persen	2	2	840.924.977	2	760.924.977	2	760.924.977	6	2.362.774.931	
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas (poktan)	Kelompok	8	8	840924977	8	760924977	8	760924977	24	2.362.774.931	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	kinerja kondisi awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Perangkat Daerah
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	Unit	0	1	499.068.495	1	419.068.495	1	419.068.495	3	1.337.205.485	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	Unit	8	8	221.607.878	8	221.607.878	8	221.607.878	24	664.823.634	
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	Unit	2	2	120.248.604	2	120.248.604	2	120.248.604	6	360.745.812	
				JUMLAH				19.026.136.383		19.092.727.860		19.159.552.408		57.278.416.651	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lamandau 2024-2026 Bidang Urusan Pertanian dan Perikanan

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Data Awal	Target Rencana Strategis			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Secara Inklusif serta Kelestarian Lingkungan Hidup		Pertumbuhan Ekonomi	Persen					
		Meningkatnya produksi Sektor Pertanian dan Perikanan	PDRB (ADHK) Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	Juta Rupiah	1.190.897,98	1.202.806,96	1.214.835,03	1.226.983,38	3.644.625,37
			PDRB (ADHK) Sub Sektor Perikanan	Juta Rupiah	23.486,46	23.721,32	23.958,54	24.198,12	71.877,99



Tabel 7.2 Indikator Kinerja Bidang Urusan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten pLamandau 2024-2026

Unit Kerja/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	kinerja kondisi awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN					19.026.136.383		19.092.727.860		19.159.552.408		57.278.416.651
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.125.224.046		999.724.046		1.256.224.046		3.381.172.138
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	689,1	695,991	50.000.000	702,95	50.000.000	709,98	50.000.000	2.108,92	150.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	2214,15	2269,50	1.075.224.046	2326,24	949.724.046	2384,40	1.206.224.046	6.980,14	3.231.172.138
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PERTANIAN					6.989.886.660		6.990.194.595		6.615.514.595		20.595.595.850
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) (ton)	Ton	698.901	712.521	3.907.047.971	726.411	3.822.055.906	740.577	3.632.055.906	2.179.510	11.361.159.783
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun/Terpelihara	Unit	5	5	1.662.578.500	5	1.827.878.500	5	1.643.198.500	15	5.133.655.500
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	Kasus	132	125	351.310.999	120	351.310.999	115	351.310.999	115	1.053.932.997



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN



	Unit Kerja/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	kinerja kondisi awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah luasan serangan OPT tanaman pangan yang mendapat fasilitasi penangan serangan OPT (Ha)	Ha	60	40	228.024.213	40	228.024.213	40	228.024.213	120	684.072.639
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang naik kelas	Persen	2	2	840.924.977	2	760.924.977	2	760.924.977	6	2.362.774.931
3	NON URUSAN					10.911.025.677	100	11.102.809.219	100	11.287.813.767	100	33.301.648.663
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah (Persen)	Persen	100	100	10.911.025.677	100	11.102.809.219	100	11.287.813.767	100	33.301.648.663



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.



Wanga Bulik, 30 Maret 2023

Kepala Dinas,

TIRYAN KUDERON, S.Pi, M.M.

NIP. 19700626 199903 1 006

Pembina Utama Muda